

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial**

##### **2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu pola kehidupan dan pergaulan sosial yang mencakup aspek material dan spiritual, yang menciptakan perasaan aman, kesopanan, kedamaian lahir dan batin, sehingga setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial mereka secara optimal untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, dengan menghormati hak dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan Pancasila.

Adapun definisi dari kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin 2018 adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dari relasi-relasi personal dan sosial, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. (Fahrudin Adi, 2014)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai upaya terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan secara sejalan dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Ini mencakup berbagai kegiatan yang diadakan baik oleh entitas pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi

terhadap pemecahan masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial dapat dianggap sebagai bidang studi akademis yang memfokuskan pada analisis kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan layanan sosial. Sama seperti disiplin ilmu lainnya seperti Sosiologi, Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Politik, Studi Kependudukan, Pekerjaan Sosial, Ilmu Kesejahteraan Sosial berusaha untuk mengembangkan landasan pengetahuannya guna mengidentifikasi masalah-masalah sosial, mengungkapkan penyebabnya, dan merancang strategi penanganannya (Husna, 2014).

### **2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Tujuan Kesejahteraan Sosial menurut Zastrow adalah:

*“The goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health, and recreational requirements of all individuals in a society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all age groups, both rich and poor. When nother institutions in our society, such as the market economy and the family, fail at times to meet the basic needs of individuals or groups of people, then social services are needed and demanded” (Zastrow, 2004).*

Berdasarkan kutipan di atas menurut Zastrow (2004), tujuan kesejahteraan sosial melibatkan pemenuhan kebutuhan sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasi bagi individu dalam masyarakat. Haryanto dan Tomagola (1997) menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan kebutuhan dasar sebagai kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Dari definisi tersebut, kebutuhan material adalah kebutuhan yang berkaitan dengan aspek fisiologis manusia. (Setiawan, 2017)

### 2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi dampak tekanan yang dihasilkan oleh perubahan sosio-ekonomi, mencegah kemungkinan konsekuensi negatif yang timbul akibat pembangunan, dan menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friedlander dan Apte (1982), ini adalah tujuan dari fungsi-fungsi kesejahteraan sosial. Adapun fungsi-fungsi menurut Fahrudin (2012:12) sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Bertujuan mencegah munculnya masalah sosial baru dengan memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam masyarakat yang mengalami perubahan, fokusnya adalah membentuk pola-pola hubungan sosial baru dan lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Berupaya mengatasi kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial sehingga individu yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara normal. Termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi.

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Berkontribusi dalam pembangunan atau pengembangan struktur dan sumber daya sosial dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Dalam kesejahteraan sosial melibatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan sektor atau bidang layanan sosial lainnya.

Tujuan utamanya adalah untuk mencegah munculnya masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi.

#### **2.1.4 Komponen Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial, selain memiliki tujuan dan fungsi yang penting, juga terdiri dari beberapa komponen yang memiliki peran krusial. Komponen-komponen ini membedakan kesejahteraan sosial dari kegiatan lainnya. Menurut Fahrudin (2012: 16) komponen-komponen tersebut meliputi:

- a. Organisasi Formal: Usaha kesejahteraan sosial dijalankan melalui organisasi formal yang secara terstruktur dan resmi.
- b. Pendanaan: Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial tidak hanya ditanggung oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat.
- c. Tuntutan kebutuhan manusia: Kesejahteraan sosial harus memperhatikan kebutuhan manusia secara menyeluruh, bukan hanya dari satu aspek saja.
- d. Profesionalisme: Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan metode dan teknik pekerjaan sosial yang terstruktur dan berbasis ilmiah. Kebijakan Pelayanan kesejahteraan sosial didukung oleh serangkaian peraturan yang mengatur syarat, proses, dan pengakhiran pelayanan.
- e. Peran serta masyarakat merupakan bagian penting dari upaya kesejahteraan sosial, di mana partisipasi mereka penting untuk keberhasilan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
- f. Data dan informasi tentang kesejahteraan sosial juga sangat penting. Pelayanan kesejahteraan sosial harus didukung oleh data dan informasi yang akurat.

Tanpa data dan informasi yang tepat, pelayanan tidak akan efektif dan tidak akan mencapai sasarannya dengan baik (Anto & Fitri, 2019).

### **2.1.5 Metode Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

#### **1. Metode-Metode Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Metode ini bertujuan untuk memberikan bantuan tatap muka kepada individu secara individual untuk mengatasi masalah personal dan sosial. Melalui *casework*, klien dibantu untuk beradaptasi dalam lingkungannya yang penuh dengan tantangan. Secara mendasar, pendekatan ini dirancang untuk mengatasi masalah keberfungsian sosial yang dihadapi oleh individu dengan melibatkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan klien tersebut. Pada tahap awal *casework*, pekerja sosial menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Membangun hubungan dengan klien untuk mengurangi kecemasannya dan meningkatkan rasa kepercayaan serta harapannya.
- 2) Membantu klien dalam menjelaskan dan memahami masalah yang dihadapinya.
- 3) Mendukung klien dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka dari layanan sosial dan mencapai tujuan yang mereka cari.
- 4) Mendorong partisipasi klien dalam upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan.

#### **2. Metode *Groupwork***

Metode ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan individu secara intelektual, emosional, dan sosial melalui kegiatan kelompok. Tujuannya adalah membantu individu meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial dan mencapai

tujuan yang diinginkan melalui pendekatan kelompok. Metode *groupwork* menggunakan pendekatan kelompok sebagai sarana penyembuhan, di mana individu yang memiliki masalah serupa dikelompokkan bersama untuk mendapatkan terapi yang dipandu oleh seorang atau tim pekerja sosial. Prinsip-prinsip dalam bimbingan sosial kelompok adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan kelompok secara terencana: Kelompok dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada individu dalam mengembangkan dirinya. Badan sosial yang menerima kelompok perlu memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan situasi kelompok untuk memungkinkan perkembangan individu menuju hal-hal yang positif sesuai dengan kebutuhan kelompok.
- 2) Memiliki tujuan bersama: Dalam bimbingan sosial kelompok, tujuan perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan hati-hati oleh pembimbing kelompok untuk memastikan keselarasan antara harapan dan kemampuan kelompok.
- 3) Penciptaan interaksi terpimpin: Pembinaan hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dan anggota kelompok harus dilakukan dengan keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok apa adanya.
- 4) Pengambilan keputusan: Kelompok perlu dibantu dalam mengambil keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
- 5) Fleksibilitas organisasi: Organisasi harus dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dan harus fleksibel untuk mencapai tujuan yang penting yang dipahami oleh para anggotanya.

- 6) Penggalian sumber daya dan penyusunan program: Sumber daya yang ada dalam masyarakat harus dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman kelompok dan program mereka. Penilaian yang berkelanjutan terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai oleh semua pihak.

Ada beberapa alasan mengapa kelompok dianggap sebagai sarana penting dalam proses bantuan pekerjaan sosial. Salah satunya adalah karena anggota kelompok terlibat dalam relasi, interaksi, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Mereka berbagi pengalaman, tujuan, dan cara mengatasi masalah, yang seringkali sulit dilakukan secara individu. (Febrianti, 2014)

## **2.2 Tinjauan Pekerja Sosial**

### **2.2.1 Latar belakang Pekerja Sosial**

Pekerja sosial, dalam kapasitasnya sebagai praktisi profesional, memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama terkait dengan kebutuhan hidup peserta UPPKS dalam menghadapi kondisi ekonomi yang kurang memadai. Untuk memahami peran-peran tersebut, kita akan terlebih dahulu mengeksplorasi definisi pekerjaan sosial yang disampaikan oleh Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW), yang dikutip oleh Fahrudin (2012:60).

*"Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consist of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes.*

*The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of interaction of all these factors” (Zastrow,2008:5).*

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang bertujuan membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka dalam berfungsi sosial, serta menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan tersebut. Praktik pekerjaan sosial melibatkan penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial untuk satu atau lebih dari tujuan berikut: memberikan pelayanan yang nyata kepada individu; memberikan konseling dan psikoterapi kepada individu, keluarga, atau kelompok; membantu komunitas atau kelompok dalam memberikan atau memperbaiki layanan sosial dan kesehatan; serta berpartisipasi dalam proses-proses legislatif yang relevan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pemahaman tentang perkembangan dan perilaku manusia, institusi sosial, ekonomi, dan budaya, serta interaksi antara semua faktor ini.

Pekerja sosial memiliki fokus utama dalam meningkatkan atau memulihkan kemampuan sosial individu, kelompok, dan komunitas. Selain memberikan pelayanan kepada individu atau kelompok tersebut untuk mencapai aspirasi mereka, pekerjaan sosial juga perlu memahami perkembangan dan perilaku manusia serta interaksi mereka dengan lingkungan sosial, sehingga mereka dapat membantu individu tersebut menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka.

### **2.2.2 Tujuan Pekerja Sosial**

Misi utama profesi pekerjaan sosial, menurut NASW, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan dasar mereka,



terutama fokus pada mereka yang rawan, terpinggirkan, dan miskin. Pekerjaan sosial berupaya memperkuat fungsi sosial individu dan meningkatkan efektivitas lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi warganya untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Misi pekerjaan sosial yang disebutkan di atas diinterpretasikan menjadi tujuan-tujuan konkret dalam praktek pekerjaan sosial, menurut NASW. Tujuan dari praktik pekerjaan sosial, sesuai dengan NASW, adalah:

1. Meningkatkan kemampuan individu untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan berkembang.
2. Menghubungkan individu dengan sistem-sistem yang menyediakan sumber daya, layanan, dan peluang.
3. Meningkatkan efektivitas dan kemanusiaan dari sistem-sistem yang menyediakan sumber daya dan layanan bagi individu.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. (Zastrow, 2008)

Berdasarkan penjelasan pertama, pekerja sosial bertanggung jawab untuk membangun kemampuan klien dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Penjelasan kedua mengindikasikan bahwa pekerja sosial membantu klien terhubung dengan layanan sosial lembaga untuk menyelesaikan masalah mereka. Penjelasan ketiga menunjukkan bahwa pekerja sosial memberikan masukan kepada lembaga pelayanan sosial untuk meningkatkan efektivitas layanan mereka. Penjelasan keempat menggambarkan peran pekerja sosial dalam membantu mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat lembaga pelayanan. Selain keempat tujuan tersebut, Zastrow

(2008) juga menambahkan empat tujuan tambahan yang dijelaskan oleh CSWE sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, serta bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Melakukan upaya advokasi dan tindakan sosial dan politik untuk memperjuangkan kebijakan, layanan, dan sumber daya yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan memanfaatkan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik pekerjaan sosial dalam berbagai konteks budaya yang beragam.

Penjelasan pertama menyatakan bahwa pekerja sosial membantu mengatasi masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Penjelasan kedua menggambarkan peran pekerja sosial sebagai perantara antara kebijakan dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial. Penjelasan ketiga menunjukkan bahwa pekerja sosial melakukan penelitian lapangan untuk memahami permasalahan yang dihadapi. Penjelasan keempat mengindikasikan bahwa pekerja sosial mengimplementasikan praktik pekerjaan sosial sesuai dengan budaya masyarakat yang ada di lapangan. (Ningsih, 2016)

### **2.2.3 Keberfungsian Sosial**

Pekerjaan sosial bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menjaga fungsi sosial individu, kelompok, dan masyarakat, menurut Siporin (1975) sebagaimana yang dijelaskan oleh Fahrudin (2012:62). Fungsi sosial merujuk pada

cara individu atau kelompok, seperti keluarga, perkumpulan, atau komunitas, berperilaku untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka. Karena orang menjalankan peran sosial, fungsi sosial mencakup kegiatan-kegiatan yang penting untuk pelaksanaan peran tersebut di dalam kelompok sosial. Strategi pekerjaan sosial dalam meningkatkan fungsi sosial, menurut Suharto (2005:27), meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi masalah yang dihadapinya.
2. Menghubungkan individu dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka mengakses berbagai sumber daya, layanan, dan peluang.
3. Meningkatkan kinerja lembaga sosial sehingga dapat memberikan layanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mendukung terciptanya situasi yang mendukung kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pernyataan tersebut, seorang pekerja sosial diharapkan mampu memperbaiki atau mengembangkan fungsi sosial anak agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

#### **2.2.4 Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial**

Dalam mencapai tujuan-tujuan seperti memecahkan masalah sosial dalam masyarakat dan menghubungkan individu dengan sistem sumber, pekerjaan sosial harus menjalankan fungsi dan tugas yang diberikan. Fungsi pekerjaan sosial,

menurut Siporin (1975) sebagaimana yang dijelaskan oleh Huraerah (2011:40), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan, menjaga, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
- b. Menjamin bahwa standar-standar subsistensi dan kesehatan optimal sesuai dengan peran dan status mereka dalam institusi-institusi sosial.
- c. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusi dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tanggung jawab seorang pekerja sosial terkait dengan kebutuhan dasar anak terlantar adalah untuk mengembangkan, menjaga, dan memberdayakan mereka agar dapat memperkuat kesejahteraan sosial mereka. Hal ini dilakukan melalui pemberian modal dan bimbingan dari pemerintah untuk memastikan penggunaan bantuan yang diterima digunakan dengan baik.

#### **2.2.5 Peran Pekerja Sosial dalam Kemandirian *Activity Daily Living***

Pekerja sosial sering terlibat dalam memberikan layanan mandiri untuk aktivitas sehari-hari kepada penyandang disabilitas intelektual di fasilitas rehabilitasi. Mereka bertanggung jawab untuk membentuk kemandirian aktivitas sehari-hari bagi penyandang disabilitas intelektual dengan latar belakang yang beragam, demi mencapai tujuan yang diinginkan. Peran yang dijalankan oleh pekerja sosial memiliki dampak pada berhasilnya pembentukan kemandirian aktivitas sehari-hari bagi klien penyandang disabilitas intelektual.

Selain itu, pekerja sosial juga memiliki peran-peran lain yang harus dilaksanakan. Pentingnya penelitian lebih lanjut terkait dengan peran yang diemban oleh pekerja sosial, terutama dalam membentuk kemandirian aktivitas sehari-hari bagi penyandang disabilitas intelektual. Peran-pean pekerja sosial ini, sebagaimana dikemukakan oleh Luhpuri, dkk (2000), meliputi sebagai fasilitator, pendidik, konselor, pemberdaya, dan pembimbing sosial kelompok. Menurut Enung H. (2014:3-4), pekerjaan sosial sebagai profesi yang memberikan pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran yang penting dalam memberikan layanan sosial kepada penyandang disabilitas. (Aulia & Apsari, 2020)

## **2.3 Tinjauan Pola Asuh Orang Tua**

### **2.3.1 Pola Asuh Orang Tua**

Menurut Gunarsa (2000), pola asuh anak adalah pola interaksi antara anak dan orang tua dimana tak hanya meliputi pemenuhan fisik dan psikologis namun juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar mendapat hidup yang selaras dengan lingkungan.

Istilah pola asuh berasal dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Poerwadarminta (1985:63), pola merujuk pada model, sementara asuh diartikan sebagai menjaga, merawat, dan mendidik anak, atau sebagai membimbing, membina, dan melatih anak agar bisa mandiri dan berdiri sendiri. Webster's mendefinisikan istilah asuh dalam bahasa Inggris sebagai nurture, yang berarti "jumlah pengaruh yang memodifikasi ekspresi potensi genetik organisme" (1980:781). Depdikbud (1990:54) mendefinisikan istilah asuh sebagai membimbing atau membantu. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan

bahwa pola asuh mengacu pada berbagai model atau bentuk pengaruh dari orang tua yang dapat memengaruhi potensi genetik individu dalam rangka merawat, mengasuh, membimbing, membina, dan mendidik anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun yang belum dewasa, agar menjadi individu mandiri di masa depan.

Pola asuh orang tua merujuk pada pendekatan atau gaya yang digunakan orang tua dalam mendidik, merawat, membimbing, dan mengasuh anak-anak mereka. Pola asuh ini mencakup berbagai perilaku, keputusan, dan interaksi yang mempengaruhi perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun kognitif. Beberapa contoh pola asuh yang umum meliputi pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh tegas namun hangat. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dapat memengaruhi perkembangan anak dalam berbagai aspek kehidupannya, dan sering kali membentuk dasar bagi nilai, sikap, dan keterampilan yang dimiliki anak saat dewasa nanti. (Kia & Murniarti, 2020)

### **2.3.2 Bentuk Pola Asuh Orang Tua**

Berbagai bentuk ekspresi orang tua dalam mengasuh atau merawat anak-anak mereka, baik dalam bentuk sikap maupun tindakan verbal maupun non-verbal, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek, seperti intelektual, emosional, sosial, dan kepribadian. Semua orang tua menginginkan anak-anak mereka sesuai dengan harapan mereka, sehingga mereka melakukan berbagai bentuk asuhan, didikan, dan bimbingan semaksimal mungkin.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan atau kontradiksi antara harapan orang tua dan kenyataan, yang dapat berdampak positif atau negatif pada

perkembangan kepribadian anak. Seperti yang diungkapkan oleh Hurlock (1978), sikap orang tua mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak, dan perlakuan orang tua terhadap anak juga memengaruhi sikap anak terhadap mereka serta perilaku anak.

Ungkapan Hurlock tersebut, terlihat bahwa sikap orang tua dalam mengasuh anak-anak cenderung menentukan pola asuh tertentu, yang dapat berdampak positif atau negatif pada perkembangan anak. Singgih (2000:82) menambahkan bahwa sering kali orang tua secara tidak disadari mengambil sikap tertentu, dan anak akan meniru sikap tersebut, membentuk pola kepribadian.

Kepribadian berkembang menjadi karakter ketika seseorang mempelajari kelemahan dan kelebihan dirinya. Dari kepribadian tersebut, karakter dibentuk. Pola asuh yang dilakukan oleh setiap orang tua secara alami akan membentuk kepribadian seseorang, sehingga terjadi perkembangan psikis untuk membentuk karakter yang kuat. Karena karakter bukanlah sesuatu yang bersifat genetik seperti kepribadian, tetapi karakter perlu dibina, dibangun, dan dikembangkan secara sadar melalui proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan konsep *character building* atau pendidikan karakter dalam upaya menyempurnakan pola asuh yang dilakukan oleh setiap orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diana Baumrind pada tahun 1967, 1971, 1977 dan 1979, dia mengusulkan untuk mengklasifikasikan pola asuh orang tua berdasarkan dua dimensi utama, yaitu *demandingness* (tuntutan) dan *responsiveness* (tanggapan atau penerimaan), yang dianggapnya sebagai dasar dari pola asuh orang tua. Baumrind mengidentifikasi tiga pola asuh yang paling

menonjol, yaitu *Authoritarian style* (gaya otoriter), *Permissive style* (gaya membolehkan), dan *Authoritative style* (gaya memerintah).

Pola asuh *Authoritarian* (otoriter) adalah tipe pola asuh di mana orang tua memiliki tuntutan yang tinggi namun kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan anak. Dalam karya Baumrind yang dikutip oleh Santrock (1995), pola asuh otoriter didefinisikan sebagai gaya yang membatasi, menghukum, dan menuntut anak untuk patuh tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara.

Ciri-ciri pola asuh otoriter antara lain:

1. Orang tua berusaha untuk mengendalikan dan mengevaluasi sikap serta perilaku anak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh orang tua.
2. Orang tua menekankan ketaatan terhadap nilai-nilai yang dianggap terbaik, serta menuntut patuh terhadap perintah, pekerjaan, dan tradisi.
3. Orang tua cenderung menggunakan tekanan verbal dan kurang memperhatikan masalah komunikasi dan penerimaan antara orang tua dan anak.
4. Orang tua cenderung menekan kebebasan dan kemandirian individual anak.

Menurut Baumrind, pola asuh otoriter cenderung memiliki dampak negatif terhadap kemampuan sosial dan kognitif anak. Hal ini dapat menyebabkan anak sulit bergaul dengan teman sebaya, cenderung merasa cemas dan gelisah, serta memiliki hati nurani yang rendah.

Pola asuh *Authoritarian* (otoriter) memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap perkembangan psikis anak dalam bersosialisasi, serta dapat menyebabkan anak memiliki hati nurani yang rendah di masa dewasa.



Pola asuh *Permissive*, menurut Santrock (1995:258) adalah gaya di mana orang tua minim terlibat dalam kehidupan anak. Ciri-cirinya meliputi pembiaran terhadap anak untuk mengatur perilaku mereka sendiri, sedikitnya peraturan di rumah, minimnya tuntutan terhadap kematangan perilaku anak, serta sikap toleran terhadap keinginan dan dorongan anak. Pola asuh ini, menurut Baumrind, cenderung menciptakan kehangatan tetapi juga dapat bersifat acuh terhadap anak.

Pola asuh otoritatif, yang mendorong anak agar mandiri namun tetap menetapkan batasan-batasan dan pengendalian, merupakan pola asuh yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Karakteristiknya meliputi penerapan standar aturan dengan jelas, penekanan pada peraturan dengan penggunaan sanksi bila perlu, dorongan terhadap kemandirian anak, mendengarkan pendapat anak dan berkomunikasi secara terbuka, serta pengakuan atas hak kedua belah pihak, baik orang tua maupun anak.

Pola asuh otoritatif mendorong anak untuk memiliki kemampuan yang lebih baik daripada pola asuh otoriter atau permisif. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoritatif cenderung memelihara tanggung jawab sosial dan kebebasan, serta memiliki perkembangan emosional dan kognitif sosial yang positif. Menurut Comstock (1973), Coopersmith (1967) dan Mc Eachern (1973), anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoritatif cenderung setuju dan menerima tuntutan yang adil, serta dapat mengembangkan kemampuan mereka.

### **2.3.3 Orang Tua**

Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua merujuk kepada ayah dan ibu kandung. Zakiah Daradjat dalam karyanya

Ilmu Pendidikan Islam menyatakan bahwa orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena mereka adalah sumber pendidikan awal bagi anak-anak. Oleh karena itu, bentuk pertama dari pendidikan dipahami berasal dari kehidupan keluarga.

Noer Aly juga mengungkapkan bahwa orang tua adalah individu dewasa yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, karena secara alami anak-anak berada dalam lingkungan orang tua mereka sejak masa awal kehidupannya. Anak-anak memulai pemahaman terhadap pendidikan dari orang tua mereka.

Secara umum, orang tua merujuk kepada orang yang lebih tua atau dihormati dalam masyarakat, namun dalam konteks ini, orang tua mengacu pada ibu dan bapak yang tidak hanya melahirkan anak-anak tetapi juga merawat, membimbing, dan memberikan contoh baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, orang tua juga memperkenalkan anak-anak kepada dunia dan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang belum dipahami oleh anak-anak. Oleh karena itu, pengetahuan pertama yang diperoleh anak-anak berasal dari orang tua mereka, karena orang tua berperan sebagai pusat kehidupan rohani anak-anak dan memperkenalkan mereka kepada dunia luar. Sebagai hasilnya, setiap reaksi emosi dan pemikiran anak-anak dapat dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan orang tua.

Menurut etimologi, orang tua yang dibahas dalam konteks ini merujuk kepada seseorang yang telah melahirkan anak dan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak, baik itu anak kandung maupun anak yang diperoleh melalui adopsi. Orang tua yang diperoleh melalui adopsi juga dianggap

sebagai "Orang tua" yang sebenarnya, karena dalam kehidupan sehari-hari, mereka memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang tua biologis dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan anak, baik secara fisik maupun spiritual. Suami dan istri, yang merupakan orang tua dalam hal ini, merupakan tokoh utama dalam keluarga, di mana tidak ada yang lebih penting bagi anak daripada kedua orang tua mereka. Terlebih lagi, dalam budaya Timur, orang tua dianggap sebagai simbol utama kehormatan, sehingga bagi anak-anak, orang tua adalah segalanya.

Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, mengasuh, dan merawat anak-anak mereka, dengan tujuan untuk mempersiapkan dan mewujudkan kebahagiaan hidup anak-anak di masa depan. Dengan kata lain, orang tua biasanya merasa bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan anak-anak mereka, karena tanggung jawab utama dalam mendidik anak-anak secara fundamental terletak pada orang tua. (Wahidin, 2019)

#### **2.3.4 Bentuk Dukungan**

Berdasarkan definisi keluarga yang mencakup berbagai bentuk, seperti bersama tanpa menikah, keluarga tanpa anak, keluarga homoseksual, keluarga orang tua tunggal, dan keluarga inti dengan dua orang tua, ditemukan bahwa konsep dukungan keluarga memiliki relevansi yang universal terlepas dari bentuk keluarga tersebut.

Menurut Friedman (2010), bentuk dukungan keluarga terbagi menjadi empat jenis, salah satunya adalah dukungan informasional. Kuntjoro (2013) menjelaskan bahwa dukungan informasional mencakup bimbingan berupa

hubungan kerja atau sosial yang memfasilitasi perolehan informasi, saran, atau nasihat untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan keluarga. Dukungan informasional, menurut Friedman (2014), melibatkan peran sebagai pengumpul dan penyebar informasi. Dalam konteks perawatan pasien jiwa, dukungan informasional menjadi krusial. (Igianny, 2020)

Keluarga perlu memberikan informasi secara berkesinambungan untuk mendukung pasien jiwa, baik di dalam maupun di luar lingkungan perawatan. Pemberian informasi terkait perawatan, komunikasi verbal dan non-verbal, modifikasi lingkungan, keamanan, kenyamanan, serta prinsip dasar untuk mengurangi stres, menjadi langkah-langkah yang dapat diajarkan oleh keluarga. Dukungan informasional yang memadai diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga untuk menjaga kondisi kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan mendukung proses penyembuhan pasien jiwa. Dengan demikian, dukungan informasional tidak hanya berdampak pada perawatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan emosional pasien jiwa serta keluarganya. (Departemen Kesehatan, 2013)

### **2.3.5 Dukungan Keluarga**

Dukungan keluarga, sebagaimana didefinisikan oleh Syahrial S. dan Pratama Y. (2015), merujuk pada sikap, tindakan, dan penerimaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap satu sama lain, mencakup berbagai dimensi yang melibatkan aspek informasional, penilaian, instrumental, dan emosional. Dimensi pertama, dukungan informasional, melibatkan pertukaran informasi dan pengetahuan di antara anggota keluarga, yang dapat berupa memberikan panduan,

informasi relevan, atau berbagi pengetahuan untuk membantu mengatasi situasi tertentu. Sementara itu, dukungan penilaian mencakup penilaian positif terhadap anggota keluarga, melibatkan penghargaan, motivasi, dan dukungan moral untuk memperbesar rasa harga diri dan kepercayaan diri individu. Dimensi selanjutnya instrumental, melibatkan bantuan fisik atau materi yang diberikan oleh keluarga kepada anggota keluarga yang membutuhkan, seperti bantuan dalam tugas rumah tangga, dukungan finansial, atau bantuan fisik lainnya. Terakhir, dukungan emosional mencakup ekspresi cinta, perhatian, dan dukungan emosional antar anggota keluarga, menciptakan ikatan emosional yang kuat, memberikan dukungan saat anggota keluarga menghadapi kesulitan atau stres, dan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung secara emosional.

Dukungan keluarga memiliki potensi besar untuk memperkuat individu, menciptakan kekuatan keluarga, dan berfungsi sebagai strategi pencegahan utama bagi keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sehari-hari, dengan dampak positif pada kesejahteraan dan keberhasilan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi konsep dukungan keluarga menjadi krusial dalam membentuk dinamika dan keberlanjutan hubungan harmonis di dalam keluarga.

## **2.4 Tinjauan Kemandirian**

### **2.4.1 Pengertian Kemandirian**

Kemandirian berhubungan dengan konsep *self* (diri) dalam perkembangan individu. Orang yang mandiri akan menunjukkan perilaku eksploratif, percaya diri,

dan kreatif. Mereka juga mampu mengambil keputusan, menerima realitas, dan berinteraksi dengan teman sebaya. (Desmita, 2017)

Konsep kemandirian merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa bergantung pada bantuan orang lain, baik dalam merawat diri secara fisik, mengambil keputusan, maupun dalam berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Dalam konteks ini, individu dengan disabilitas perlu menjalani pelatihan kemandirian guna memungkinkan mereka untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. (Sa'diyah, 2017)

Driyarkara menyatakan bahwa kemandirian merupakan sebuah kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individuasi. Dengan demikian, kemandirian menandakan adanya semangat untuk menjadi lebih baik dan percaya diri, kemampuan untuk merenungkan masalah dan mengambil keputusan, serta memiliki disiplin dan tanggung jawab, tanpa tergantung pada orang lain. Seorang yang mandiri, ditandai dengan perilaku yang ramah dan dekat, kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dalam kegiatan sehari-hari tanpa meminta bantuan orang lain (James, 2002); mampu menanggung tanggung jawab, dan memiliki stabilitas emosi. (Darajad, 1982)

Secara keseluruhan, konsep kemandirian mencakup kemampuan seseorang untuk melakukan tugas-tugas kehidupan sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain, bersifat mandiri, dan memiliki kontrol terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri. Bagi anak-anak penyandang disabilitas intelektual, pengembangan kemandirian menjadi hal yang sangat penting untuk memfasilitasi adaptasi dan partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. (Sunarty, 2016)

#### **2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian**

Faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian, seperti yang dijelaskan oleh Ali dan Asrori (2004), mencakup beberapa dimensi yang berkaitan dengan genetika, pola asuh orang tua, sistem pendidikan di sekolah, dan sistem kehidupan di masyarakat. faktor tersebut yaitu:

1. Gen atau Keturunan Orang Tua: Faktor genetika atau keturunan dari orang tua dapat memainkan peran dalam pembentukan kemandirian anak. Orang tua dengan sifat kemandirian yang tinggi seringkali memiliki potensi untuk menurunkan karakteristik tersebut kepada anak-anak mereka. Namun, perdebatan tetap ada, karena ada pandangan yang menyatakan bahwa bukan sifat kemandirian yang diturunkan, melainkan cara orang tua mendidik anak.
2. Pola Asuh Orang Tua: Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan kemandirian anak. Larangan tanpa penjelasan yang jelas dapat menghambat perkembangan kemandirian, sementara suasana interaksi yang nyaman dan mendukung dapat mendorong perkembangan tersebut. Dengan demikian, pendekatan orang tua dalam memberikan bimbingan dan batasan sangat memengaruhi bagaimana anak mengembangkan kemandiriannya.
3. Sistem Pendidikan di Sekolah: Proses pendidikan di sekolah memainkan peran penting dalam membentuk kemandirian anak. Sistem pendidikan yang demokratis, memberikan penjelasan, dan menghargai potensi anak dapat mendorong perkembangan kemandirian. Sebaliknya, pendidikan yang menekankan indoktrinasi atau sanksi dapat menghambat kemandirian anak.

4. Sistem Kehidupan di Masyarakat: Faktor lingkungan masyarakat juga turut memengaruhi perkembangan kemandirian. Lingkungan yang kurang aman dan tidak menghargai potensi anak dalam kegiatan produktif dapat menghambat perkembangan kemandirian. Sebaliknya, masyarakat yang aman, menghargai, dan tidak terpeka pada tingkatan dapat mendorong perkembangan kemandirian anak. (Sunarsih, 2016)

### **2.4.3 Aspek Kemandirian**

Menurut Steinberg, sebagaimana dijelaskan oleh Desmita (2011:286), aspek kemandirian terbagi menjadi tiga karakteristik kemandirian yang saling terkait, yakni: Kemandirian Emosional: Kemandirian emosional mengacu pada perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Contohnya dapat diilustrasikan dalam hubungan emosional antara warga binaan panti dengan pengasuh atau guru. Seseorang yang memiliki kemandirian emosional mampu mengontrol emosinya secara tepat, tidak mudah meluapkan emosinya secara sembarangan, yang dapat mengganggu kondisi sekitar, dan memiliki rasa simpati yang tinggi.

Kemandirian Perilaku: Kemandirian perilaku merupakan kemampuan untuk membuat keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Individu yang memiliki kemandirian perilaku dapat mengontrol diri dan membuat keputusan secara mandiri, serta bertanggung jawab atas tindakan dan pilihannya. Ini mencerminkan kemampuan untuk mandiri dalam mengelola perilaku dan tindakan sehari-hari.



**Kemandirian Nilai:** Kemandirian nilai merujuk pada kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, serta memahami apa yang dianggap penting dan tidak penting. Individu yang memiliki kemandirian nilai mampu berprinsip dan dapat membedakan antara apa yang dianggap baik dan yang dianggap salah. Ini melibatkan kemampuan untuk memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan perilaku. Secara keseluruhan, karakteristik kemandirian tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap mandiri apabila memiliki ketiga aspek kemandirian tersebut. Kemandirian emosional, perilaku, dan nilai merupakan dimensi yang saling melengkapi, membentuk fondasi kemandirian yang holistik, dan mencerminkan kemampuan individu untuk mengontrol emosi, mengambil keputusan, dan memahami nilai-nilai yang menjadi dasar tindakan dan pilihannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### **2.4.4 Kemandirian Anak Disabilitas Intelektual**

Kemandirian anak disabilitas intelektual merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dan dilatih. Pelatihan aktivitas sehari-hari dan pengembangan keterampilan khusus dapat menjadi langkah-langkah penting untuk meningkatkan kemandirian mereka. Perlu dicatat bahwa pencapaian kemandirian pada anak disabilitas intelektual tidak dapat diartikan secara sama dengan pencapaian anak normal, karena adanya hambatan dalam kecerdasan yang perlu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. (Imansyah & Muhid, 2022)

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kemandirian anak disabilitas intelektual melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Pemahaman dan Pengenalan:** Melakukan penilaian atau asesmen untuk memahami kemampuan anak dalam berbagai aspek, termasuk fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Hal ini membantu dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak.
2. **Optimalisasi Pembelajaran:** Menekankan pada optimalisasi pembelajaran di semua bidang, termasuk bidang akademik, bina diri, dan keterampilan. Dengan melakukan pembelajaran secara menyeluruh, anak dapat mencapai hasil yang optimal dan mengembangkan rasa percaya diri.
3. **Mengembangkan Strategi Pembelajaran:** Mengembangkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak disabilitas intelektual. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.

Pentingnya memberikan perhatian khusus pada kemandirian anak disabilitas intelektual adalah untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Upaya ini tidak hanya melibatkan pengembangan keterampilan praktis, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap kebutuhan dan potensi individu. Dengan memberikan dukungan yang tepat, diharapkan anak disabilitas intelektual dapat mencapai tingkat kemandirian yang optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. (Roslina & Rahayu, 2018)

## **2.5 Tinjauan Disabilitas Intelektual**

### **2.5.1 Disabilitas Intelektual**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami gangguan dalam perkembangan mental yang ditandai oleh penurunan fungsi konkret pada setiap tahap perkembangan, yang secara keseluruhan memengaruhi tingkat kecerdasan mereka. Selain memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual, mereka juga menghadapi keterbatasan dalam hal adaptasi, yang dapat mengakibatkan keterbatasan dalam kemampuan komunikasi, kesehatan dan keamanan, prestasi akademis, dan kemampuan kerja. *American Psychological Association* (APA) mengklasifikasikan disabilitas intelektual berdasarkan tingkat kecerdasan atau skor IQ. Disabilitas intelektual ringan, dengan skor IQ antara 55-70, masih memungkinkan untuk dilatih, tetapi strategi harus disesuaikan dengan kemampuan pemahaman individu. Ciri-ciri dari disabilitas intelektual meliputi kesulitan dalam mempertahankan perhatian, memori pendek, dan kesulitan dalam mengingat informasi. (Naufal, 2022)

Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang signifikan di bawah rata-rata untuk anak sebaya mereka, dan hal ini juga disertai dengan ketidakmampuan beradaptasi terhadap perilaku yang muncul pada tahap perkembangan. (Kemenpppa, 2013)

Sebelumnya, kondisi ini dikenal dengan istilah "retardasi mental" atau "tunagrahita," namun seiring perkembangan, istilahnya diubah menjadi "disabilitas

intelektual." Menurut Sutini (2009) seperti yang dikutip oleh Napolion (2010), individu dengan disabilitas intelektual mengalami gangguan perkembangan yang berdampak pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, termasuk kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosialisasi. Sebuah individu dapat dikategorikan sebagai memiliki disabilitas intelektual jika memenuhi tiga kriteria, yaitu adanya keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum di bawah rata-rata, ketidakmampuan dalam berperilaku adaptif selama periode perkembangan. Dengan mengidentifikasi dan memahami karakteristik disabilitas intelektual, dapat dirancang program dan intervensi yang tepat guna memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup anak yang bersangkutan. (Wulandari et al., 2018)

### **2.5.2 Klasifikasi Anak Disabilitas Intelektual**

Kelompok penyandang disabilitas intelektual adalah mereka yang mengalami hambatan dalam perkembangan intelektual, yang dapat mengganggu aktivitas mereka. Kondisi ini mencakup keterbelakangan mental dan rendahnya tingkat kecerdasan, serta dapat dianggap sebagai kelainan mental. Menurut klasifikasi anak disabilitas intelektual oleh Geniofam (2010), terdapat tiga tingkatan anak tunagrahita, yaitu:

Anak Tunagrahita Ringan (Mampu Didik):

- Memiliki IQ dalam rentang 50/55 – 70/75.
- Mampu dididik dalam bidang akademik.
- Mampu menyesuaikan diri di lingkungan sosial.
- Dapat mandiri dan mampu melakukan pekerjaan yang sederhana

Anak Tunagrahita Sedang (Mampu Latih):

- Memiliki IQ dalam rentang 20/25 – 50/55.
- Mampu mengurus diri sendiri dan melakukan pekerjaan.
- Dapat berkomunikasi dan beradaptasi di lingkungan terdekat.
- Tidak dapat mengikuti pelajaran yang bersifat akademik.
- Perkembangan bahasa sangat terbatas.

Anak Tunagrahita Berat (Mampu Rawat):

- Memiliki IQ dalam rentang 0–20/25.
- Sepanjang hidupnya sangat tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain.
- Tidak dapat hidup sendiri di tengah-tengah Masyarakat (Supena et al., 2022)

### **2.5.3 Karakteristik Anak Disabilitas Intelektual**

Anak tunagrahita atau anak dengan disabilitas intelektual mengalami hambatan dalam perkembangan kecerdasan mereka, sehingga tidak dapat berkembang secara optimal. Menurut Sutjihati Somantri, beberapa karakteristik umum anak disabilitas intelektual atau tunagrahita meliputi:

#### **1. Keterbatasan Intelegensi:**

- Intelegensi merupakan fungsi kompleks yang mencakup kemampuan mempelajari informasi, berfikir abstrak, kreatif, menilai secara kritis, dan merencanakan masa depan.
- Anak dengan disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam mempelajari informasi, berfikir secara logis, dan kesulitan membedakan antara hal yang baik dan buruk.

## 2. Keterbatasan Sosial:

- Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam masyarakat dan cenderung bergantung pada bantuan orang lain.
- Mereka cenderung ketergantungan dan berteman dengan anak-anak yang lebih muda dari usia mereka, sehingga perlu bimbingan dan pengawasan konstan.

## 3. Keterbatasan Fungsi-Fungsi Mental Lainnya:

- Anak disabilitas intelektual mengalami keterbatasan dalam penguasaan Bahasa, bukan karena kerusakan artikulasi, tetapi pusat pengolahan kata yang kurang berfungsi dengan baik.
- Kesulitan dalam mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik dan buruk, serta membedakan yang benar dan salah.
- Memerlukan waktu yang lebih lama untuk merespons situasi yang baru dikenal.
- Anak tunagrahita cenderung pelupa dan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kembali suatu ingatan.

Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan perlunya dukungan dan bimbingan yang khusus sesuai dengan kebutuhan anak disabilitas intelektual untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. (Fakhiratunnisa et al., 2022)

## **2.6 Tinjauan *Activity Daily Living* (ADL)**

### **2.6.1 Pengertian *Activity Daily Living* (ADL)**

Suddart (2001) mengemukakan ADL adalah kegiatan melakukan aktivitas sehari-hari secara rutin. ADL merupakan aktivitas perawatan diri yang dilakukan

setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup individu. ADL adalah aktifitas yang berhubungan dengan rutinitas kehidupan sehari-hari yaitu meliputi perawatan diri secara mandiri dan pemenuhan dasar (Dewi, 2020).

Istilah *Activity of Daily Living* (ADL) atau aktivitas kehidupan sehari-hari dalam konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus dikenal sebagai Bina Diri, yang mengacu pada kegiatan personal yang memiliki dampak dan keterkaitan dengan hubungan antarindividu. Istilah ini merujuk pada kegiatan yang bersifat pribadi karena melibatkan keterampilan yang harus dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, jika memungkinkan.

Pengertian Bina, yang berarti membangun atau proses penyempurnaan untuk mencapai yang lebih baik, Bina Diri merupakan upaya pembangunan diri individu baik secara personal maupun sosial melalui pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuannya adalah agar individu mencapai kemandirian yang memadai dalam kehidupan sehari-hari.

Bina Diri tidak hanya terbatas pada kegiatan perawatan diri, tetapi lebih dari itu, karena kemampuan ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk beradaptasi dan mencapai tingkat kemandirian yang diinginkan.

### **2.6.2 Tujuan *Activity Daily Living* (ADL)**

Secara garis besar, bidang studi Bina Diri bertujuan untuk membantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar dapat mencapai kemandirian serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat tanpa bergantung terlalu banyak pada bantuan orang lain. Adapun tujuan spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong dan meningkatkan kemampuan ABK dalam mengelola diri sendiri, termasuk dalam hal perawatan diri, membantu diri sendiri, dan menjaga kesehatan diri.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan ABK dalam berkomunikasi agar mereka dapat mengekspresikan diri mereka dengan baik.
3. Membangun dan meningkatkan kemampuan ABK dalam berinteraksi sosial dengan orang lain.

Tujuan pelatihan ADL mencakup peningkatan keterampilan fungsional anak disabilitas intelektual, seperti kemampuan makan, minum, mandi, dan melibatkan mereka dalam aktivitas sehari-hari lainnya. Dalam prosesnya, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial anak, membantu mereka mengembangkan kemandirian dalam berbagai tugas sehari-hari, dan mendapatkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk beradaptasi dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas.

Melalui pelatihan *activity daily living*, diharapkan anak disabilitas intelektual dapat merasakan peningkatan keterampilan akademis, yang melibatkan pengembangan keterampilan motorik halus dan kognitif mereka. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pada keluarga dan orang-orang terdekat yang merawat anak disabilitas intelektual, sehingga memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pelatihan *activity daily living* didesain untuk memastikan bahwa anak disabilitas intelektual dapat menjalani aktivitas sehari-hari



sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sekaligus meningkatkan berbagai aspek dalam kehidupan mereka secara holistik.

### **2.6.3 Macam – Macam *Activity Daily Living* (ADL)**

Sugiarto (2005) mengemukakan ada beberapa macam *Activity Daily Living*, yaitu :

1. *Activity Daily Living* dasar, sering disebut *Activity Daily Living* saja, yaitu keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya meliputi berpakaian, makan & minum, toileting, mandi, berhias dan mobilitas. Ada juga yang memasukkan kontinensi buang air besar dan buang air kecil dalam kategori *activity daily living* dasar ini.
2. *Activity Daily Living* Instrumental, yaitu *activity daily living* yang berhubungan dengan penggunaan alat atau benda penunjang kehidupan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menggunakan telepon, menulis, mengetik, mengelola uang kertas.
3. *Activity Daily Living* Vokasional, yaitu *activity daily living* yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan sekolah.
4. *Activity Daily Living* Non Vokasional, yaitu *activity daily living* yang bersifat rekreasional, hobi, dan mengisi waktu luang

### **2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Activity Daily Living* (ADL)**

Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya *activity daily living* (ADL), menurut Hardywinoto, melibatkan beberapa aspek kunci yang berperan dalam kemandirian individu, terutama bagi anak disabilitas intelektual. Pertama, faktor umur dan status perkembangan menjadi penentu penting dalam pelaksanaan

*activity daily living*. Setiap individu, termasuk anak disabilitas intelektual, akan menunjukkan tingkat kemandirian yang berbeda tergantung pada tahap perkembangan mereka. Selanjutnya, kesehatan fisiologis memainkan peran krusial dalam pelaksanaan *activity daily living*. Kondisi fisik dan kesehatan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Faktor-faktor seperti gangguan fisik atau kesehatan umum dapat membatasi atau meningkatkan kemandirian dalam *activity daily living*. (Gunawan, 2016)

Fungsi kognitif juga menjadi faktor kunci yang memengaruhi pelaksanaan *activity daily living*. Proses menerima, mengorganisasi, dan menginterpretasikan stimulus sensorik dalam fungsi kognitif memainkan peran penting dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam aktivitas sehari-hari. Faktor psikososial, yang melibatkan interaksi antara perilaku intrapersonal dan interpersonal, memiliki dampak pada pemulihan kemampuan adaptasi seseorang. Hal ini berkontribusi pada keberhasilan individu dalam menjalankan *activity daily living* dan berfungsi kembali secara optimal dalam lingkungan sosialnya. (Sumiyati, 2021)

Pelayanan kesehatan yang diterima oleh anak disabilitas intelektual juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan *activity daily living*. Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dapat memperkuat atau membatasi kemampuan anak dalam merawat diri dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini membantu dalam merancang intervensi yang tepat dan mendukung anak disabilitas

intelektual dalam mencapai tingkat kemandirian yang optimal dalam menjalankan *activity daily living* (ADL).